



GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN

GOOD GOVERNANCE

(Studi Pada Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)

SKRIPSI

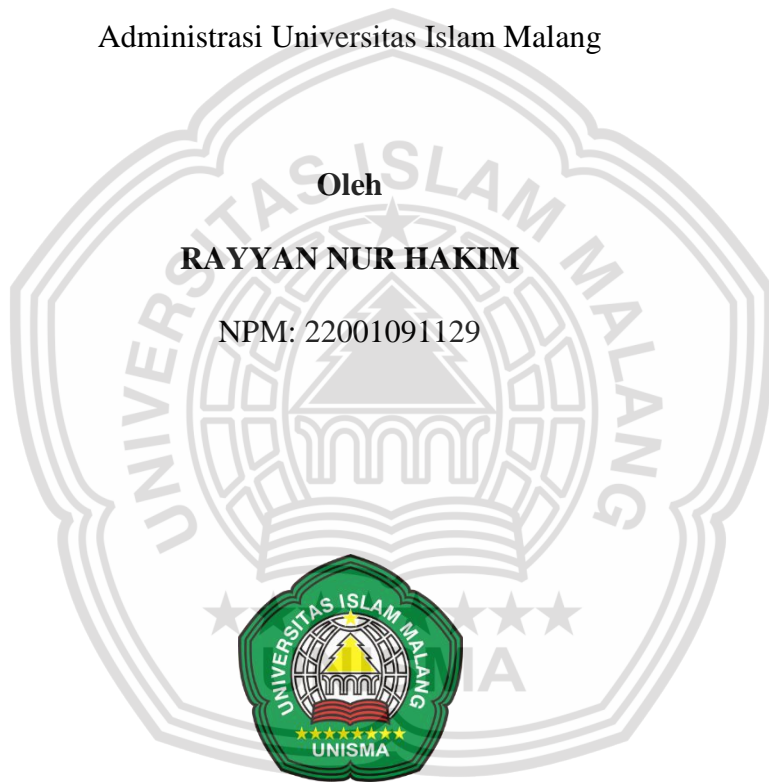
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Pada Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Islam Malang

Oleh

RAYYAN NUR HAKIM

NPM: 22001091129



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

2024

RINGKASAN

Rayyan Nur Hakim, 2024. NPM 22001091129, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Pada Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), Dosen Pembimbing I: Prof. Drs. M. Mas'ud Said, MM., Ph.D, Dosen Pembimbing II: Suyeno, S.Sos., M.AP

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang mendeskripsikan Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Pada Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Desa menjadi bagian terkecil dari Kabupaten/Kota dimana desa menjadi sasaran yang dianggap tepat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, dalam hal ini pemerintah desa menjadi basis pemerintahan yang paling rendah jika dilihat dalam struktur organisasi pemerintahan Indonesia. Dengan begitu desa dianggap menjadi penentu berhasil dan tidaknya pembangunan nasional yang universal. Oleh karenanya, bagaimana seorang Kepala Desa dalam memimpin suatu daerah menjadi suatu hal yang penting sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan juga kehidupan bermasyarakat.

Metode yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif, dengan fokus penelitian dengan menggunakan teori melalui indikator gaya kepemimpinan menurut Kartono (2008) yakni a) kemampuan mengambil keputusan, b) kemampuan memotivasi, c) kemampuan komunikasi, d) kemampuan mengendalikan bawahan, e) tanggung jawab. Data berupa data primer yang didapat secara langsung melalui wawancara dan juga data sekunder dari sumber-sumber lain yang berkaitan. Analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasilnya ditemukan bahwasanya terdapat beberapa poin dalam indikator kepemimpinan yang tidak terpenuhi. Hal ini diperoleh peneliti melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan aparatur desa dan juga masyarakat dimana terdapat beberapa perbedaan persektif. Dari kelima poin indikator a) kemampuan mengambil keputusan, b) kemampuan memotivasi, c) kemampuan komunikasi, d) kemampuan mengendalikan bawahan, e) tanggung jawab, Kepala Desa Klampok dirasa kurang tepat dalam mengambil keputusan, masyarakat menganggap bahwasanya keputusan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sedangkan aparatur pemerintah beranggapan keputusan telah diambil dengan baik dan tepat. Selain itu dalam pemberian motivasi, masyarakat merasa kehadiran kepala desa jarang terlihat sehingga tidak sedikit masyarakat yang tidak tahu pemimpinnya sendiri.

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Kepala Desa, *Good Governance*

SUMMARY

Rayyan Nur Hakim, 2024. Student ID 22001091129, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Universitas Islam Malang. Leadership Style of Village Heads in Achieving Good Governance (A Study on Klampok Village, Singosari District, Malang Regency). Supervising Lecturer I: Prof. Drs. M. Mas'ud Said, MM., Ph.D., Supervising Lecturer II: Suyeno, S.Sos., M.AP.

This thesis is the result of research that describes the Leadership Style of Village Heads in Achieving Good Governance (A Study on Klampok Village, Singosari District, Malang Regency). Villages are the smallest units of a regency or city, and are considered the most appropriate target for implementing development activities. In this context, village governments are the lowest level of government in Indonesia's administrative structure. Consequently, the success or failure of national development can be significantly influenced by the effectiveness of village governance. Thus, the leadership of a village head becomes crucial as a measure of the success of government administration and community life.

The research employs a qualitative method, focusing on leadership styles using indicators from Kartono's theory (2008), including a) decision-making ability, b) motivational ability, c) communication ability, d) ability to control subordinates, e) responsibility. Data consists of primary data obtained directly through interviews and secondary data from related sources. Data analysis involves the process of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification.

The findings reveal that some indicators of leadership are not fully met. This was discovered through interviews with village officials and community members, where there were differences in perspectives. Among the five indicators— a) decision-making ability, b) motivational ability, c) communication ability, d) ability to control subordinates, e) responsibility, the village head of Klampok was found to be less effective in decision-making. The community felt that decisions were not aligned with their needs, while government officials believed that decisions were made appropriately. Additionally, regarding motivation, the community noted that the village head's presence was rarely seen, and many community members were unfamiliar with their own leader.

Keywords: *Leadership Style, Village Head, Good Governance*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan menjadi upaya yang dilaksanakan oleh keseluruhan komponen bangsa Indonesia dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Yang menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan nasional yang sebagaimana Nawacita program pemerintahan presiden Joko Widodo yakni dengan membangun Indonesia dari pinggir, dalam arti lain percepatan pembangunan yang ada di desa-desa tertinggal yang diperuntukkan mengurangi angka kemiskinan dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Maju dan tidaknya bangsa Indonesia bergantung pada maju dan tidaknya desa dan juga masyarakat yang ada pada desa. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah pusat dan provinsi Bersama-sama menyamakan persepsi untuk menjadikan desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan. Hal tersebut menjadi bukti pentingnya desa dalam percepatan pembangunan bangsa, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuannya yakni untuk mengangkat desa pada posisi subjek yang terhormat dalam ketatanegaraan Indonesia.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan desa merupakan “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya Rahman (2015) menjelaskan desa dengan “desa atau yang disebut lainnya diwadahi dalam NKRI, hal ini kemudian menyatakan bahwa Indonesia memberikan pengakuan keberagaman dalam keseragaman”.

Desa menjadi bagian terkecil dari Kabupaten/Kota dimana desa menjadi sasaran yang dianggap tepat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, dalam hal ini pemerintah desa menjadi basis pemerintahan yang paling rendah jika dilihat dalam struktur organisasi pemerintahan Indonesia. Dengan begitu desa dianggap menjadi penentu berhasil dan tidaknya pembangunan nasional yang universal. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya kabupaten/kota diselenggarakan atas asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem juga prinsip NKRI.

Pelaksanaan pemerintahan daerah tersebut selanjutnya dinamakan Otonomi Daerah. Semangat utama dari lahirnya Undang-Undang Desa sebenarnya adalah cara demi memperkuat dasar itu sendiri, baik secara kelembagaannya maupun sistem pemerintahannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat, karena desa dengan segenap kelengkapan pemerintahannya merupakan kawasan yang menghadap langsung dengan

rakyat. Pemerintahan Desa adalah sentra politik lokal yang dipersonifikasi lewat Kepala Desa dan Perangkat Desa itu sendiri (Abdul, 2020).

Kepala Desa sebagai pemimpin Pemerintahan Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa lain; Sekretaris Desa, Pelaksanaan Kewilayahan dan Pelaksanaan Teknis, dalam pemilihannya juga telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kepala Desa dalam pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 sendiri bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam menjalankan tugasnya perangkat desa harus mempunyai kemampuan yang baik yaitu, kemampuan melayani masyarakat, seperti aktivitas pencatatan informasi dan data tentang aktivitas pemerintahan desa dalam buku administrasi umum di kantor desa. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maka perangkat desa perlu memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik seperti, kuantitas, ketepatan waktu (Timeliness), efektifitas biaya, kemandirian, dan kualitas. Hal ini dapat terwujud apabila didukung oleh seorang pemimpin yang mampu mendorong agar dapat mencapai hasil kerja yang optimal.

Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mengakui kekuatan-kekuatan penting yang terkandung dalam individu. Setiap individu mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Setiap individu mempunyai tingkat keahlian yang berbeda-beda pula. Pemimpin harus fleksibel dengan itu pemimpin dapat menerapkan segala peraturan dan

kebijakan organisasi serta melimpahkan tugas dan tanggung jawab dengan tepat.

Gaya kepemimpinan merupakan kemampuan mengarahkan dan menunjukkan dalam suatu organisasi. Salah satu gaya kepemimpinan adalah kepemimpinan demokratis, yakni suatu kepemimpinan yang di gambarkan melibatkan bawahannya dalam mengambil keputusan, mendelegasikan wewenang, mendorong partisipasi dalam memutuskan metode dan sasaran kerja, menggunakan umpan balik sebagai peluang untuk melatih karyawan.

Pemimpin bergaya demokratis menggambarkan pemimpin yang cenderung melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan, mendelegasikan wewenang, mendorong partisipasi dalam memutuskan metode dan sasaran kerja, dan menggunakan umpan balik sebagai peluang untuk melatih karyawan (Robbins, 2008). Indikator kepemimpinan demokratis ada 4 (empat) yaitu keputusan dibuat bersama, menghargai potensi setiap bawahannya, mendengar kritik saran/pendapat bawahannya, melakukan kerjasama dengan bawahannya.

Dalam penerapannya, gaya kepemimpinan demokratis ini terdapat koordinasi yang kuat atas pekerjaan yang dijalankan masing-masing bawahan sehingga kekuatan utama bukan pada pimpinan melainkan partisipasi aktif dari semua anggota. Rasa tanggung jawab internal pada masing-masing bawahan juga menjadi salah satu dasar dalam gaya kepemimpinan demokratis. Selain melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan,

seorang pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan demokratis harus bersedia mengakui keahlian para bawahan dengan bidangnya masing-masing.

Dengan adanya gaya kepemimpinan yang baik, maka hal ini akan membawa implikasi pada peningkatan kinerja bawahan. Dalam hal ini jika dikaitka dengan pemerintahan desa maka, gaya kepemimpinan yang dipergunakan oleh kepala desa selama menjabat dan memimpin masyarakat suatu desa menjadi salah satu indikator yang menentukan keberhasilan pembangunan yang ada pada desa tersebut. Melalui gaya kepemimpinan yang digunakan oleh kepala desa, akan menentukan bagaimana kinerja dari pegawai yang ada dalam pemerintah desa itu sendiri. Dengan artian lain, gaya kepemimpinan juga menentukan bagaimana aparatur yang ada di pemerintahan desa dan juga kepala desa itu sendiri memberikan pengaruh kepada masyarakatnya.

Salah satu poin penting dalam penyelenggaraan desa yakni berkenaan dengan *good governance*. *Good governance* merupakan bentuk dari penyelenggaraan suatu organisasi untuk mencapai tujuan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Menurut Hamka (2007), beberapa poin penting yang terkait dengan implementasi prinsip-prinsip *Good governance* merupakan pegangan bagi birokrasi publik dalam melakukan transformasi manajemen pemerintahan. Menurut Tjokroamidjojo dalam Hamka (2007), tuntutan ke arah *Good governance* juga lahir akibat kualitas pelayanan publik yang rendah. Lebih jauh disebutkan bahwa *Good governance* berintegritas dari pelaksanaan pemerintahan. Adapun prinsip yang harus diperhatikan

adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, aturan hukum, perlakuan yang adil (jaminan fairness).

Melalui pernyataan tersebut, hal serupa juga harus menjadi acuan dalam menjalankan pemerintahan dalam lingkup desa. Prinsip *good governance* dalam tata kelola pelaksanaan pemerintah desa sebagai lingkup terkecil dan yang paling dekat dengan masyarakat menjadi penting untuk diperhatikan. Dengan adanya tata kelola yang baik dengan membawa prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, aturan hukum, dan perlakuan yang adil dapat menjadi bukti adanya tanggung jawab yang dijalankan dengan baik. Di sisi lain, prinsip tersebut menjadi salah satu tolak ukur masyarakat dapat berpartisipasi dan juga memberikan kepercayaan kepada aparatur desa. Hal ini juga berlaku pada kepemimpinan desa yang ada di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Bagaimana gaya kepemimpinan dapat berpengaruh pada pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*.

Desa Klampok merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Desa Klampok. dalam melaksanakan tanggungjawabnya, kepala desa di Desa Klampok memiliki tanggung jawab yang besar, sehingga gaya kepemimpinan yang dibawa juga menjadi pengaruh yang besar bagi berjalannya pemerintahan desa di Desa Klampok. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang besar, hal ini memperlihatkan bahwasanya pemerintahan desa mempunyai peran yang krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Ironisnya, distribusi tanggung jawab yang begitu besar ini banyak sekali tidak diiringi

dengan sumber daya yang baik pula. Hal ini juga menjadi salah satu permasalahan yang ada di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Salah satu yang menjadi permasalahan di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang yakni tata kelola yang masih jauh dari harapan. Hal ini didasarkan atas kurang disiplinnya aparat di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dalam menjalankan tugas dan juga tanggung jawab yang diberikan. Tidak menutup kemungkinan terburuk dengan adanya otonomi desa akan melahirkan bibit-bibit korupsi yang baru.

Dari wawancara yang peneliti lakukan bersama perangkat desa bapak Didik mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa sudah lumayan baik.

“Kalau di desa ini saya rasa pak kades sudah memimpin dengan cukup baik, tapi mungkin meningkatkan kinerja masih ada beberapa ditingkatkan karena sebagai contoh kita juga sebagai aparatur desa sering telat dan lain sebagainya”

Dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa Klampok dalam meningkatkan kinerja aparatur desa, mengingat desa klampok termasuk salah satu desa yang strategis yang di damping oleh seorang kepala desa sebagai salah satu wujud dalam mengimplementasikan *good governance*. Sebagai pemimpin perangkat desa, kepala desa Klampok bekerja untuk melaksanakan misi besar meningkatkan pemerintahan yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Tujuan hal ini didukung oleh kinerja pegawai desa agar hasilnya lebih

berdaya sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan yang memanfaatkan potensi yang di miliki.

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah peneliti paparkan di atas, dengan ini peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam dengan judul penelitian “**Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Pada Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, peneliti mengambil rumusan masalah:

- a. Bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang?
- b. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pada gaya kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, peneliti menentukan tujuan penelitian ini yakni:

- a. Untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

- b. Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat pada gaya kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari dilaksanakannya penelitian ini terbagi atas:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan untuk memberikan kontribusi secara teoritis, memberikan informasi atau sumbangan pemikiran kepada instansi yang bersangkutan yakni Prodi Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, selain itu bisa digunakan sebagai bahan kajian dan referensi bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Bagi Penulis/Peneliti

Hasil penelitian ini bisa menambah wawasan atau sambungan pemikiran terhadap masalah yang di temukan selama melakukan penelitian serta menambah pengalaman di bidang penelitian.

- b. Manfaat Bagi Perangkat Desa

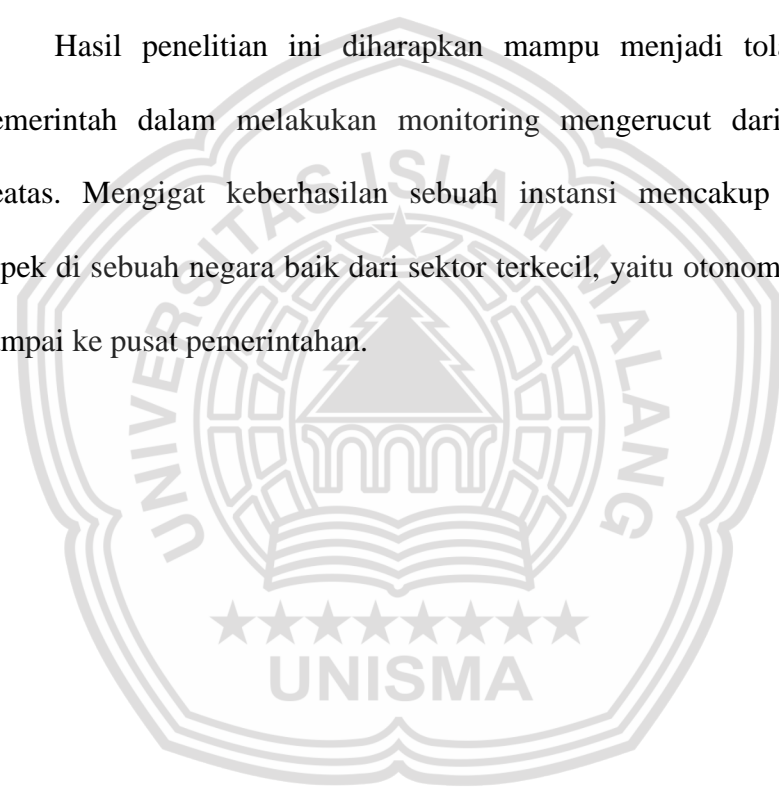
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terkait prospek keberlanjutan kinerja kedepan, yang berguna bagi instansi terkait.

c. Manfaat Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat di jadikan sumbangan bagi pembaca dan pihak lain sebagai bahan informasi serta rujukan untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan kepemimpinan demokratis

d. Manfaat Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur pemerintah dalam melakukan monitoring mengerucut dari bawah keatas. Mengingat keberhasilan sebuah instansi mencakup seluruh aspek di sebuah negara baik dari sektor terkecil, yaitu otonomi daerah sampai ke pusat pemerintahan.



BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan penemuan dan juga pembahasan pada bab sebelumnya, dalam peran gaya kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, dapat disimpulkan bahwasanya:

1) Kemampuan mengambil keputusan

Dalam proses pengambilan keputusan, peran kepala desa dalam mengambil keputusan terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat dan juga aparatur desa sehingga proses pengambilan keputusan tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Perbedaan persepsi ini berkenaan dengan hasil yang menunjukkan bahwasanya aparatur desa menjelaskan persepsi kemampuan dalam pengambilan keputusan secara lebih luas yakni pada posisi Kepala Desa Klampok dalam mengambil keputusan pada proses pengembangan aparatur desa. Sedangkan masyarakat menuntut pada proses pengambilan keputusan akan pemenuhan hak dan kebutuhan yang ada di masyarakat dan harus dilakukan pemerintah desa agar bisa memperjuangkan kepentingan umum dengan efektif, efisien dan transparan.

2) Kemampuan memotivasi

Dorongan yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada aparatur desa selaku garis koordinasi di bawahnya dirasa cukup baik dengan adanya

peningkatan kompetensi dan keahlian yang harus diperbaharui dan dikembangkan. Akan tetapi hubungan dengan masyarakat dirasa kurang baik.

3) Kemampuan komunikasi

Kemampuan Kepala Desa dalam berkomunikasi dan berdiskusi dengan bawahan dapat disimpulkan cukup baik, sehingga Kepala Desa dapat memberikan intruksi dengan jelas kepada para aparatur desa dan dapat dijalankan dengan baik. Akan tetapi perannya di masyarakat dirasa cukup kurang dikarenakan keterlibatannya yang cukup minim. Masyarakat menuntut Plt. Kepala Desa untuk memberikan perhatian lebih kepada masyarakat akan tetapi dalam hasil penelitian ditemukan bahwasanya Plt. Kepala Desa kurang dalam keterlibatannya secara langsung pada kegiatan yang ada di Desa. Hanya sesekali terlihat dan masyarakat juga tidak banyak yang mengetahui pimpinan desa mereka.

4) Kemampuan mengendalikan bawahan

Pada poin ini ditemukan bahwasanya Plt. Kepala Desa Klampok dirasa memiliki kemampuan yang baik, ditemukan bahwasanya Plt. Kepala Desa Klampok mewajibkan seluruh aparatur desa untuk turut serta dalam proses pengembangan kemampuan dan kompetensi serta dalam prosesnya melayani masyarakat Desa Klampok dengan memberikan pelayanan yang baik, efektif dan efisien. Kontrol terhadap program dan juga tugas wewenang setiap aparatur Desa Klampok dilakukan melalui evaluasi yang dilakukan. Meskipun dalam penyelenggaraan

pemerintahannya tidak sepenuhnya sempurna, akan tetapi pemerintah desa mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia di Desa Klampok.

5) Tanggung jawab

Tanggung jawab yang dimaksudkan disini yakni berkenaan dengan peran Kepala Desa dalam proses partisipasi pada pemerintahan di atasnya dan juga akuntabilitas pada masyarakat Desa klampok. Hal ini berkenaan dengan akuntabilitas keuangan, program desa mulai dari penyusunan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban yang melibatkan masyarakat Desa Klampok. Melalui hal tersebut diketahui bahwasanya tanggung jawab yang diemban oleh Kepala Desa juga sama dengan aparatur desa lainnya, hanya saja Kepala Desa memiliki control yang lebih tinggi dan luas atas tanggung jawabnya kepada pemerintah di atasnya, kepada bawahannya dan juga terhadap masyarakat Desa Klampok.

Selain itu terdapat faktor pendukung dan penghambat pada gaya kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, yakni:

- 1) Faktor Pendukung
 - a) Dukungan Kepala Desa akan program pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur Desa Klampok.
 - b) Partisipasi masyarakat.
- 2) Faktor Penghambat

- a) Minimnya interaksi Kepala Desa Klampok dengan masyarakat
- b) Kurang optimalnya penggunaan website sebagai sarana pelayanan secara elektronik.

1.2 Saran

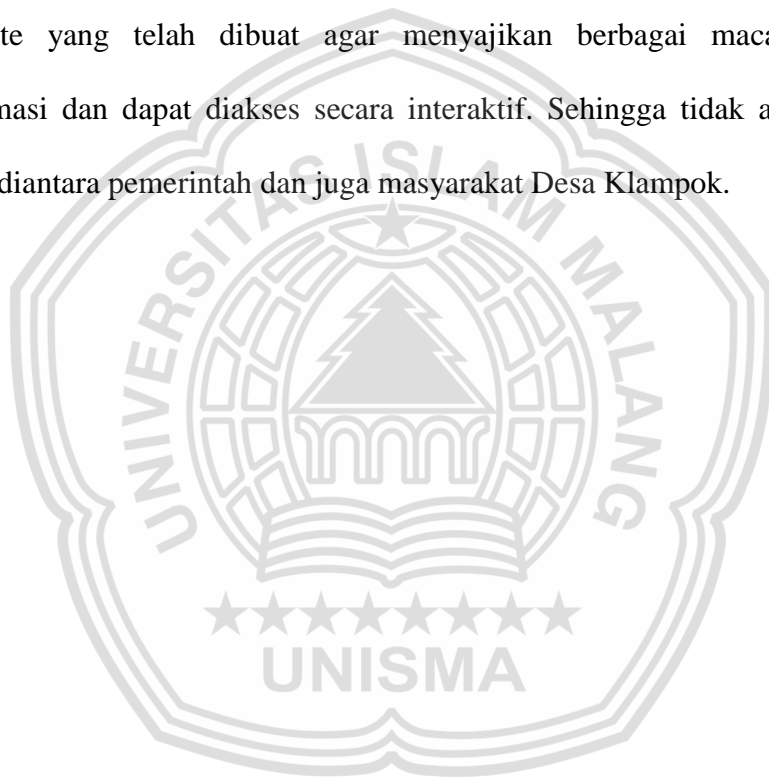
Melalui pemaparan dan juga permasalahan yang terjadi pada pembahasan gaya Kepemimpinan Kepala Desa Klampok dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, maka dalam hal ini peneliti memberikan saran dan rekomendasi berkenaan dengan permasalahan tersebut diantaranya:

1. Dialog Interaktif dengan Kepala Desa

Yang menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan penelitian ini yakni pada peran kepala desa terhadap masyarakat. Melalui sudut pandang masyarakat, Kepala Desa Klampok dianggap masih sangat kurang berperan dan juga berinteraksi secara langsung dengan masyarakat Desa Klampok sehingga hal ini menimbulkan spekulasi-spekulasi negative yang timbul di masyarakat. Melalui hal tersebut, peneliti merekomendasikan adanya dialog interaktif yang dilaksanakan secara terbuka bersama dengan Kepala Desa, seluruh aparatur desa yang ada di Desa Klampok, dan juga masyarakat Desa Klampok. Sehingga melalui proses ini akan ditemukan berbagai solusi yang baik menurut pemerintah desa dan juga masyarakat. Hal ini juga akan mengikis jarak yang sebelumnya secara tidak langsung terbentuk antara Kepala Desa Klampok dengan masyarakat Desa Klampok.

2. Penyajian Informasi melalui website

Salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan dalam proses transparansi penyelenggaraan pemerintahan Desa Klampok dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan website yang sebelumnya telah dibuat. Sumber daya yang telah ada sebaiknya dimanfaatkan oleh aparatur. Desa Klampok dengan lebih baik lagi. Pengembangan website yang telah dibuat agar menyajikan berbagai macam informasi dan dapat diakses secara interaktif. Sehingga tidak ada jarak diantara pemerintah dan juga masyarakat Desa Klampok.



DAFTAR PUSTAKA

- Ady Baskoro Wicaksono dan Sugeng Wahyudi, 2011, Pengaruh Efektivitas Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja Pegawai, Jakarta.
- Afifuddin. Suyeno. 2018. Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II terhadap Produktivitas Kerja Kepala Dinas Kesehatan di Kota Malang Jawa Timur. *Jurnal Ketahanan Pangan*. Vol. 2, No, 1.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational Leadership*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Cahyanti, Indri Dwi. Yaqub Cikusin. Retno Wulan Sekarsari. 2019. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang). *Jurnal Respon Publik*. Vol. 13, No. 5.
- Dr. Rahman Yabbar & Ardi Hamzah,. (2015). Tata Kelola Pemerintahan Desa Dari peraturan di Desa hingga pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dari Perencanaan Pembangunan Desa Hingga Pengelolaan Keuangan Desa, Surabaya: Penerbit Pustaka.
- Erman, N., & Fahroby, A. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Rusindo Expertiza Inspekciya Pekanbaru. *MAPAN: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi, Perbankan*, 3(1), 30-42.
- Hani, S. Manusia, S. D., Press, G. M., Mondy, W. R., Edisi, S. D. M. M. S. D. M., Nitisemito, A. S., ... & Ketiga, C. (2021). Buku. *Laporan Keuangan Ukm Syariah. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*.
- Harahap, N. (2020). Penelitian kualitatif.
- HR Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Cet. VI, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Ivancevich, et al., 2012, Organizations: Behaviour, Structure and Process, New York: McGrawHill.

- Janet Moyles, 2006, *Effective Leadership and Management in The Early Years*, New York: Open University Press.
- Kartono, Kartini. 2008. *Kepemimpinan*. Edisi ke-2. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mardalena,. (2017). Efektivitas Kepemimpinan; Sebuah Kajian Teoritis. "FOKUS" Jurnal Pendidikan STKIP YPM Bangko | Volume 2. No. 1, Maret 2017
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Al-Islam 2 Cet. I: Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Nasrizal, dkk., Dari Good Governance Ke Sound Governance: Reformasi Prinsip dan Regulasi Pelayanan Publik di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota,. STIA LPPN PADANG Jurnal Public Administration, Bussines and Rural Development Planning VOLUME 1 No. 2 November 2019
- Nopitasari, E. & Herry, K. (2018). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis, Motivasi Intrinsik dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Pangansari Utama Food Industry. Jurnal Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nasional Volume14, No.1, Januari 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Philipus M. Hadjon, dkk., *Hukum Administrasi Negara Dan Good Governance*, Cetakan Kedua Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2012.
- Raco, M., & Tunney, E. (2010). Visibilities and invisibilities in urban development: Small business communities and the London Olympics 2012. *Urban studies*, 47(10), 2069-2091.
- Ridder, H. G. (2014). Book Review: *Qualitative data analysis. A methods sourcebook*.
- Rivai, Veithzal dkk. (2014). *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Robbins, M. (2015). People still want democracy. *J. Democracy*, 26, 80.
- Said, M. Mas'ud (2009). Menggagas Inovative Bureaucracy Dalam Pemerintahan Indonesia. *Jurnal*.
- Shadily, H. (2011). dikutip dalam Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Siagian, F., Siregar, S. V., & Rahadian, Y. (2013). Corporate governance, reporting quality, and firm value: evidence from Indonesia. *Journal of accounting in emerging economies*, 3(1), 4-20.
- Sinambela, L. P. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun tim kerja yang solid untuk meningkatkan kinerja. Bumi Aksara.
- Suwatno, H. D., & Priansa, D. J. (2011). Manajemen SDM dalam organisasi Publik dan Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sweeney, P. D., & McFarlin, D. B. (2002). *Organizational behavior: Solutions for management*. McGraw-Hill.
- Syailendra, W.P., (2023). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Tawang Sari Kecamatan Aman Kabupaten Sidoarjo. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 3 No. 01, Januari (2023) e-ISSN: 2797-04692
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
- Winardi, R. (2014). Pengaruh Motivasi Konsumen, Persepsi Kualitas dan Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Supra X 125 di Purworejo. *SEGMEN: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 10(1. a).
- Winardi. (2014). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Yvete Ramchunder, 2012, *The Role of Emotional and Self-Efficacy as Attributes of Leadership Effectiveness*, South Africa.
- Zahiah, Sharhana. M. Mas'ud Said, Taifuq Rahman Ilyas. 2022. Analisis Kinerja Pegawai dan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang (Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja). *Jurnal Respon Publik*. Vol. 14, No. 8.